Legalitas

Legalitas: Jurnal Hukum, 16(2), Desember. 2024, 114-121
ISSN 2085-0212 (Print), ISSN 2597-8861 (Online)
DOI 10.33087/legalitas.v16i2.533

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Kornelius Soya Yohan Dachi
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Correspondence email: yohandachi@gmail.com

Abstract, *Indonesia is a country based on Pancasila. Every citizen is obliged to obey all the rules set by the state. In reality, human rights violations continue to be carried out by irresponsible individuals, one example of which is sexual violence, both physical and non-physical. With the development of technology in the era of globalization, there are now many cases of electronic sexual violence which are classified as non-physical sexual violence. This electronic sexual violence can take the form of distributing intimate content in the form of photos, videos and other electronic documents that contain sexual elements against the wishes of the recipient. Social networks made possible by the Internet function as a means of dissemination. This is the current emergency situation of sexual violence which is very detrimental to both victims and the entire community. The aim of this research is to find out how Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS) can provide justice to perpetrators and victims by examining how the law is applied to perpetrators and what legal protection the victims are entitled to. Because this way we will know how legal protection is for victims. This article of the law can function as intended, and the deterrent effect of this law will help minimize the recurrence of electronic sexual violence.*

Keywords*: Legal Protection, Victims, Sexual Violence.*

Abstrak, Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Setiap warga negara wajib menaati segala aturan yang ditetapkan oleh negara. Kenyataannya, pelanggaran HAM masih terus dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, salah satu contohnya adalah kekerasan seksual, baik fisik maupun non fisik. Dengan berkembangnya teknologi di era globalisasi, kini banyak terjadi kasus kekerasan seksual elektronik yang tergolong dalam kekerasan seksual non fisik. Kekerasan seksual elektronik ini dapat berupa penyebaran konten intim berupa foto, video, dan dokumen elektronik lainnya yang mengandung unsur seksual yang bertentangan dengan keinginan penerimanya. Jejaring sosial yang dimungkinkan oleh Internet berfungsi sebagai sarana penyebaran.Inilah keadaan darurat kekerasan seksual saat ini yang sangat merugikan baik bagi korban maupun seluruh masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dapat memberikan keadilan terhadap pelaku dan korban dengan mengkaji bagaimana hukum tersebut diterapkan terhadap pelaku dan perlindungan hukum apa saja yang menjadi hak korban. Karena dengan cara ini kita akan mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi korbannya. Pasal undang-undang ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dan efek jera dari undang-undang ini akan membantu meminimalisir terulangnya kekerasan seksual elektronik.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Kekerasan Seksual.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual menjadi masalah yang ia alami Angka sudah lama menjadi perbincangan masyarakat Indonesia. Namun kekerasan seksual bisa saja terjadi semua orang, perempuan dan laki-laki, dan mereka bisa melakukannya Angel number terjadi pada semua orang sejak usia muda orang lanjut usia juga bisa mengalaminya kekerasan seksual. Faktanya, korban kejahatan seksual dengan kekerasan yang paling rentan adalah: wanita. Berbagai pertanyaan rumit muncul Kehidupan wanita, termasuk kejahatan kekerasan dan pelecehan seksual seksual (pelecehan seksual). Kekerasan terhadap wanita pada dasarnya sering didapat kesenjangan dalam peran dan fungsi gender. Wanita Diduga, tampaknya menjadi sasaran kekerasan , yang merupakan makhluk lemah dan tidak berdaya.[1] Hal ini juga menciptakan persepsi sebagai makhluk yang lemah perempuan berisiko lebih tinggi menjadi korban kejahatan. Salah satu kejahatan paling umum terhadap perempuan adalah kekerasan seksual. Umumnya pelecehan seksual atau pelecehan seksual Pelecehan dapat diartikan sebagai tindakan atau Perilaku yang terarah atau terarah pada sesuatu yang berkonotasi seksual bisa berupa lelucon atau pernyataan dan tindakan vulgar yang “cabul”. menggoda dan membuat isyarat tertentu mengarah pada aktivitas seksual baik secara verbal atau non-verbal. Perkembangan teknologi informasi Tahun merupakan tanda dimulainya modernisasi di perusahaan. Kehadiran Internet sangatlah penting saat ini memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai sosialisasi, pendidikan, bisnis, dll. Sayang sekali kejahatannya begitu tinggi Internet atau (cybercrime) dalam bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan Masyarakat adalah salah satu bentuk kejahatan yang ada di jejaring sosial, yaitu semua jenis aplikasi jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau teknologi canggih melalui penyalahgunaan Salah satunya adalah

[1] Ely Dian Uswatina, dkk, “Power Perempuan Dalam Mencegah Kekerasan Seksual” (Pekalongan : PT Nasya Expanding Management), 2021, hlm.3.

kemudahan teknologi digital bentuk kejahatan diberitakan di media Terdapat kasus, termasuk pelecehan seksual di media sosial , di mana salah satu tindak pidana yang diakibatkannya terjadi Kemajuan teknis di zaman modern pelanggaran terkait pelecehan seksual non fisik Pada tahun , sebagian besar korbannya adalah perempuan.[2] kasus pelecehan seksual di media Media sosial membuat Anda tidak nyaman, mengganggu Anda, hingga perasaan trauma yang dapat membahayakan kesehatan Anda korban psikologis. Tindakan ini tidak langsung Dengan melakukan hal tersebut, melanggar hak asasi korban kehilangan hak untuk hidup damai, , yang karenanya harus ada undang-undangnya dihilangkan. Terjadinya tindakan ini merupakan akibat negatif perubahan informasi tanpa pendamping Pendidikan seks dan kurangnya moral. Bekerja pelecehan seksual yang sering kita jumpai Wanita di jejaring sosial bisa menjadi rayuan, godaan atau aktivitas tidak menyenangkan lainnya yang dapat menyebabkannya dilakukan dengan mengirim pesan atau chatting, langsung mengomentari postingan tersebut Kirim pesan, kirim foto, gambar, dan video berisi konten yang bersifat seksual atau pornografi.

Kekerasan seksual melalui media sosial ini banyak di jumpai hampir di setiap media sosial yang ada seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Secara umum kejahatan yang sering dilakukan oleh pelaku pelecehan seksual pada beberapa media sosial tersebut antara lain:

1. Mengirim teks aiau gambar yang bermuatan atau mengandung konten negatif kepada korban dalam hal ini yang di maksud bermuatan atau mengandung konten negatif ialah pesan berbau menggoda, melecehkan atau bahkan mengirim gambar, tulisan dan pesan yang bermuatan pornografi dan melanggar asusila serta nilai-nilai kesopanan dalam masyarakat. Mengirim teks dan gambar bernuansa seksual ini dikategorikan sebagai bentuk pelecehan seksual secara visual melalui media sosial
2. Dengan cara spamming atau dengan cara menulis komentar yang tidak pantas pada kolom komentar atau media sosial korbannya dengan niat menjatuhkan, merendahkan dan bahkan mempermalukan korban yang bernuansa menggoda dan berbau seksual Biasanya modus ini sering dijumpai pada akun media sosial public figure, modus dengan cara ini umumnya dilakukan pelaku dengan menggunakan akun media sosial samaran untul: melindungi dirinya namun dengan sengaja melecehkan, mempermalukan, merendahkan harkat martabat korban.
3. Dengan cara melakukan pendekatan dengan lawan jenis yang dijadikan target (korban) Melakukan pendekatan dengan lawan jenis dan dijadikan target ini pada umumnya disertai dengan ancaman ataupun imbalan dan hadiah yang diiming-imingi pelaku terhadap korban. Pendekatan emosional secara pribadi. Modus yang terakhir ini adalah salah satu perbuatan jahat yang mana pelaku memang berniat untuk menjatuhkan. mempermalukan dan/atau merendalikan harkat dan martabat korban yang dijadikan korban dan/atau sasaran. Pelaku pelecehan seksual dengan modus ini biasanya sering menargetkan anak-anak di bawah umur sebagai korbannya, atau juga kerap kali dilakukan oleh mantan pasangan/ mantan pacar terhadap pasangannya sebagai salah satu bentuk revenge porn.

Banyaknya jenis kejahatan baru yang muncul saat ini menuntut pemerintah untuk mengeluarkan undang-undang atau peraturan baru khususnya pada bidang cyber ini guna mengatasi permasalahan yang muncul sekaligus mencegah agar tidak lahir kembali tindak pidana baru. Salah satu hukum/ aturan yang baru adalah hukum siber (cyber law). Hukum siber (cyber law) adalah istilah lhukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi, istilah siber sendiri digunakan karena identik dengan "dunia maya"[3]

Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2021, ada 940 kasus yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan sepanjang tahun lalu, meningkat dari tahun sebelumnya, 2019, sebanyak 241 kasus. Laporan dari lembaga layanan yang dihimpun Komnas Perempuan pun tak kalah meroket. Pada 2020 tercatat ada 510 kasus yang dilaporkan, naik hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya yang berada di angka 126 kasus.8 Sesuai dengan Konstitusi UUD 1945 yang termaktub mengenai tujuan negara dalam alinea ke IV yang menyatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang berarti bahwa peran negara dibutuhkandalam memberikan dan menjamin adanya perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Konstitusi di Indonesia telah menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pengaturan hukum mengenai kekerasan seksual baik secara fisik maupunnon fisik sebenarnya belum cukup komprehensif dan efektif, maka dari itu digagaslah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang sudah resmi diundangkan, setelah disahkan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 12 April 2022. Menteri PPPA menegaskan upaya Pemerintah untuk memutus mata rantai kekerasan seksual melalui diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Salah satu tindak kekerasan seksual di Indonesia yang menjadi sorotan adalah kekerasan seksual berbasis elektronik atau kerap disebut kekerasan seksual digital. Perbuatan- perbuatan yang

[2]Rohan Colier,” Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas”, (Yogyakarta: PT. Tiara Yogya),1998, hlm.4.

[3] Munir, Nurdiman, Pengantar Hukum Siber Indonesia, Edisi Ketiga, PT. Grafindo Persada, Depok, 2017, him, 26.

tergolong tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik sudah diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

METODE

metode penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang dengan tujuan dapat dikembangkan, dan dibuktikan dengan pengetahuan tertentu sehingga nantinya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu. Metode penelitian mengandung uraian tentang pendekatan spesifikasi, sumber data dan materi penelitian, alat lokasi dan subyek penelitian serta analisis data penelitian.

1. Tipe Penelitian

   Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisis terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas, penelitian hukum secara yuridis merupakan penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada atau terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara suatu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.[4]

2. Pendekatan Penelitian

   Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif maka data yang digunakan adalah jenis data sekunder, yang diambil dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi. Data sekundekr yang dipakai dalam penelitian in terdiri dari:

   a. Bahan Hukum Primer

      Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturang perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.[5] Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

      1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;
      2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
      3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
      4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
      5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

   b. Bahan Hukum Sekunder

      Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penelitian akan mengarah. Bahan hukum sekuder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah hukum-hukum karya ilmiah, makalah-makalah, doktrin atau pendapat para ahli hukum yang terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji.

   c. Bahan Hukum Tersier

      Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.[6]

3. Metode Pengumpulan Data

   Metode pengumpulan data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

   a. Studi Pustaka

      Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian studi pustaka adalah tekni dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, Koran, atau karya para pakar.[7]

---

[4]Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, Hlm, 97.

[5]Lawmetha. "metode penelitian hukum normatif", *Wordpress*, 19 Mei 2011, hlm, 3. https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/

[6]Haris Sudirman Lubis, "Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi korban Penyalahgunaan Norkoba di Kota Batam", Skripsi, Universitas Internasional Batam, Batam, 2018, hlm, 68.

[7]Meleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rodakarya, Bandung, 2010, hlm, 186.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis dokumen-dokumen, catatan-catatan yang penting dan berhubungan serta dapat memberikan data-data untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian

Sugiyono mendefenisikan mengenai studi dokumentasi bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan kebijakan.[8]

4. Analisis Bahan Hukum

Hasil analisis dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahan secara jelas dan lengkap berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, adapun analisis dilakukan dengan cara:

a. Menginventarisir semua peraturan perundang-undangan dan konsep hukum sesuai dengan permasalahan yang dibahas;
b. Mensistematis semua peraturan perundang-undangan dan konsep hukum sesuai dengan permasalah yang dibahas;dan
c. Menginterpretasikan dari semua peraturan perundang-undangan dan konsep hukum sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Istilah kata Penegakan hukum memiliki arti yaitu, kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandanganpandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangakaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.[9] Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang harus ditegakkan dimata hukumguna melindungi korban. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau yang biasa dik zenal dengan UU TPKS, maka dipakailah istilah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik yang dicantumkan pada Pasal 4 ayat 1 point i yang digolongkan sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Pengaturan yang lebih jelas mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik diatur pada Pasal 14 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022. Kekerasan seksual berbasis elektronik adalah salah satu tindakan kekerasan berupa pelecehan seksual yang dilakukan di dunia elektronik yaitu dengan menggunakan teknologi internet. Kekerasan Seksual berbasis Elektronik dapat terjadi kepada siapa saja baik terhadap perempuan maupun terhadap laki-laki dari kalangan muda hingga dewasa dengan latar belakang apa saja. Komnas Perempuan mencatat ada beberapa jenis kekerasanseksual yang difasilitasi oleh kehadiran teknologi, mulai dari pelecehan di ruang- ruang maya, peretasan, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, hingga ancaman penyebaran foto dan video intim. Ada pula sextortion, atau pemerasan lewat video intim. Fenomena kekerasan seksual berbasis elektronik semakin meningkat terlebih semenjak pandemi covid-19 yang banyak mengharuskan masyarakat untuk beraktivitas dari rumah dan lebih banyak menggunakan teknologi internet dalam beraktivitas saat itu. Kekerasan seksual berbasis elektronik memiliki kaitan yang sangat erat dengan dunia teknologi internet dan media sosial karena jenis kekerasan seksual ini terjadi di dunia digital atau elektronik. Menurut laporan yang diterima oleh lembaya layanan, dari total 1.510 kasus kekerasan seksual, jumlah kekerasan seksual berbasis elektronik mencapai angka 518 kasus yang dilaporkan. Peningkatan kasus ini begitu signifikan terjadi sepanjang tahun 2021, menurut CATAHU Komnas Perempuan yaitu mencapai 940 kasus yang dilaporkan dibandingkan pada tahun 2020 hanya mencapai 281 kasus. Hal ini menunjukkan bahawa minimnya ruang aman bagi korban termasuk di dunia digital.Menurut data safenet yang dikutip oleh suara.com, pada masa pandemi covid 19,dari semua jenis kekerasan seksual berbasis elektronik, penyebaran konten intim non-konsensual atau tanpa persetujuan menempati angka tertinggi, SAFEnet melalui KaSubdivisi Digital At- Risks (DARK) Ellen Kusuma, menyebutkan adanya peningkatan aduan kasusterkait penyebaran konten intim non-konsensual hingga hampir 400%. Sayangnya,kebanyakan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik hanya dibiarkan berlalu begitu saja baik oleh korban maupun pihak lainnya, hanya 11% perempuan dan 5% laki-laki yang mendokumentasikan kejadian tersebut. Tindakan kekerasan seksual berbasis

[8]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabet, Bandung, 2016, hlm, 240.
[9] Kamus Hukum "Penegakan Hukum'.

elektronik ini tentu saja tidak lepas dari niat jahat pelaku yang tidak bertanggung jawab dengan maksud dan tujuan mereka sendiri yang sangat merugikan korban. Pelaku tindak pidana menurut doktrinadalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi: Di pidana sebagai pelaku tindak pidana : (1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turutserta melakukan perbuatan; (2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunaka kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Sebelum lahirnya Undang-Undang TPKS , kekerasan seksual berbasis elektronik yang dahulu dikenal dengan kekerasan berbasis gender online (KBGO) penegakan hukum terhadap pelakunya diatur pada Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi. Adapun dasar hukum kekerasan seksual berbasiselektronik, dapatlah diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Pornografi (UU Nomor 44 Tahun 2008) Adapun bagian Pasal yang dapat menjerat adanya tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik dalam pasal ini, termaktub pada Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, yang menyatakan: "Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor,menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:" a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak. Pengaturan pidana UU Pornografi mengatur tentang pelaku yang melakukan tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik sesuai dengan aturan akan dikenakan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 250 juta rupiah dan paling banyak 6 miliar rupiah.
2. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008) Adapun bagian pasal yang dapat menjerat adanya tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik dalam pasal ini termaktub pada Pasal 27 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi elektronik yang menyatakan: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". Ketentuan pidana pelaku yang melakukan tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik sesuai dengan aturan akan dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda palingbanyak 1 miliar rupiah.
3. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU Nomor 12 Tahun 2022) Adapun bagian Pasal yang dapat menjerat adanya tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik dalam Pasal ini, termaktub pada Pasal 14 ayat (1) UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyatakan: (1) "Setiap Orang yang tanpa hak: a. Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/ dokumen elektronik untuk tujuan seksual.

Pengaturan pidana pelaku yang melakukan tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik sesuai dengan aturan akan dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Salah satu contoh kasus yang sedang ramai menjadi perbincangan masyarakat saat ini mengenai tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik adalah kasus Rebecca Klopper(RK) seorang tokoh publik figur yang terkenal di kalangan anak muda Indonesia, dimana namanya terseret usai sebuah video syur tersebar di internet dan diduga perempuan dalam video itu adalah dirinya. Setelah diselidiki, diduga kuat pelaku penyebaran konten intim non-consensual itu adalah mantan kekasih RK yang telah melakukan perekaman saat mereka sedang melakukan hubungan intim tetapi keadaan RK sedang tidak sadarkan diri sehingga dia tidak menghendaki perekaman tersebut. Diduga motif penyebaran ini adalah bentuk pelampiasan dari mantan RK karena dendam masa lalu. Kasus ini telah dilaporkan oleh RK ke pihak kepolisian dan telah diterima lalu telah dilanjutkan pada tahap penyidikan. Kekerasan seksual berbasis elektronik yang dialami RK ini bisa menjerat pelaku dengan Pasal 14 ayat (1) poin a yaitu melakukan perekaman bermuatan seksual tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman.15 Kasus kekerasan seksual berbasis elektronik lainnya juga terjadi kepada Adapun contoh kasus lain terkait kekerasan seksual berbasis elektronik yangterjadi di Kota Malang, dan pelakunya adalah seorang Jurnalis berinisial DN. Kejadian ini dilaporkan oleh teman sesama jurnalisnya yang menjadi salah satu korban. Kasus ini berawal dari adanya grup whatsapp yang beranggotakan beberapa jurnalis didaerah Malang, dan disitulah pelaku melakukan aksinya yang dianggapnya hanyalah bahan candaan sesama jurnalis, dimana pelaku menyebarkanstiker bermuatan seksual yaitu bergambar pornografi yang menampilkan wanita dan pria yang telanjang dan sedang melakukan hubungan intim. Dyah Arum Sari sebagai pelapor dari kasusini mengaku tidak terimadengan perbuatan DN sehinggamelaporkannya ke pihak berwajib untuk menindak lanjuti kasus ini. Kemajuan bidang teknologi telah menciptakan masyarakat yang memiliki

kebudayaan baru, serta masyarakat yang memiliki suatu kebebasan melakukan aktivitasnya serta melaksanakan rekreasi dengan cara yang praktis. Perkembangan teknologi seperti ini telah menimbulkan revolusi komunikasi yang menyebabkan kehidupan masyarakat di berbagai negara tidak bisa terlepas dan bahkan telah ditentukan oleh informasi dan komunikasi. Sangat disayangkan ada saja oknumoknum yang tidak bertanggung jawab dan menyalah gunakan media sosial yang difasilitasi internet dalam dunia elektronik, dengan melakukan perbuatanperbuatan yang melanggar norma-norma kemanusiaan sehingga merugikan pihak korban. Dengan adanya fasilitas ini, menjadi wadah bagi pelaku yang tidak memahami dampak dan resiko baik bagi pelaku, korban, maupun seluruh pengguna media sosial. Diantaranya penyebaran konten bernuansa seksual di media sosial, serta penyebaran fitur stiker mengandung unsur seksual di whatsapp.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Menurut peraturan hukum yang berlaku , yaitu dalam Pasal 1 ayat (8) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, arti dari Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Menurut Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, istilah kata korban memiliki pengertian yaitu orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Menurut Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, istilah kata korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik,mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual. Korban dalam kasus kekerasan seksual berbasis elektronik bisa terjadikepada siapa saja , baik kepada laki-laki maupun perempuan, terhadap anak, terhadap orang dewasa, bahkan terhadap kategori orang yang berlatar belakang penyandang disabillitas juga bisa menjadi korban kekerasan seksual. Jadi jenis- jenis korban bisa terjadi pada siapa saja terlepas dari jenis kelamin, umur, pendidikan, nilai-nilai budaya, nilainilai agama, warga negara, latar belakang, maupun status sosial. Namun biasanya yang sangat rawan menjadi korban kejahatan kekerasan seksual adalah kaum perempuan. Perempuan dinilai sebagai makhluk lemah yang kedudukannya selalu berada di bawah lakilaki. Perempuan seakan-akan menjadi objek kekerasan, dengan anggapan bahwa mereka adalah mahkluk lemah dan tak berdaya. Pada akhirnya perempuan sering menerima perlakuan tak pantas dan di anggap sebagai makhluk yang lemah sehingga membuat perempuan berpotensi lebih besar menjadi korban kejahatan seksual. Tidak hanya perempuan, kategori rentan selanjutnya juga adalah terhadap anak- anak dibawa umur. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyatakan Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan catatan KemenPPPA, kasus kekerasan seksual terhadap anakmencapai 9.588 kasus pada 2022. Jumlah itu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yakni 4.162 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak juga perlu diperhatikan. Kategori anak yang rentan mengalami kekerasan seksual baik secara fisik maupun non fisik adalah anak remaja. Usia mereka masih dikatakan belum matang atau belum cakap, jadi bisa saja mereka mudah terpengaruh sehingga mempermudah para pelaku untuk melakukan kekerasan seksual. Di era modernisasi saat ini, usia remaja pada umumnya sudah mempunyai alat elektronik seperti handphone dan tentu saja tidak terlepas dari media whatsapp untuk berkomunikasi. Hal ini yang menjadi kerentanan bagi para anak-anak kategori remaja yang bisa saja menjadi korban kekerasan seksual berbasis elektronik. Korban kekerasan seksual berbasis elektronik berhak mendapat perlindungan hukum. Jika dilihat dari segi perlindungan korban, maka Undang-Undang perlindungan saksi dan korban memberikan gamabaran terkait hak-hak, dan bentuk perlindungan yang didapat untuk korban. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menyatakan hak-hak korban sebagai berikut : Saksi dan Korban berhak : a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga,dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. memberikan keterangan tanpa tekanan; d. mendapat penerjemah; e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; i. dirahasiakan identitasnya; j. mendapat identitas baru; k. mendapat tempat kediaman sementara; l. mendapat tempat kediaman baru; m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; n. mendapat nasihat hukum; o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau p. mendapat pendampingan.

Apabila dikaitkan dengan korban kasus kekerasan seksual berbasis elektronik, negara sudah mengupayakan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, itulah wujud kehadiran negara dalam melindungi korban kekerasan seksual. Dalam UU TPKS sudah diatur secara khusus (Lex Specialis) terkait Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik yaitu pada Pasal 14 ayat 1, dan adapun pengaturan terkait

perlindungan, hak-hak korban, jugasampai pengaturan terkait pendampingan korban . Adapun perlindungan terhadap korban menurut UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Pasal 67: (1) Hak Korban meliputi: a. hak atas penanganan; b. hak atas perlindungan; dan c. hak atas pemulihan. (2) Pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban. Melalui hak korban diatas, telah diperjelas dalam pasal 68 sampai pasal 70 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan ditarik kesimpulan terkait hak-hak atas korban antara lain:

I. Hak atas penanganan : a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan; b. hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan; c. hak atas layanan hukum; d. hak atas penguatan psikologis; e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis; f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; g. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.
II. Hak atas pelindungan : a. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan; b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan; c. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan; d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas; e. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat f. penegak hukum yang merendahkan Korban; g. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan h. Pelindungan Korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksualyang telah dilaporkan.
III. Hak atas Pemulihan : a. Rehabilitasi medis; b. Rehabilitasi mental dan sosial; c. Pemberdayaan sosial; d. Restitusi dan/ atau kompensasi; dan e. Reintegrasi sosial. Dalam penanganan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik, khususnya pendampingan untuk pemulihan korban, aparatur-aparatur negara, lembagalembaga layanan yang berwajib harus menyadari akan kepentingan korban dan memiliki pemahaman untuk berprespektif korban, sehingga dengan begitu korban bisa mendapatkan support agar lebih berdaya dan terdorong untuk berani menggunakan jalur hukum, karena dengan adanya UU TPKS yang menjadi payung hukum bagi korban ini akan sangat mengupayakan penanganan kasus kekerasan seksual baik fisik maupun non fisik , dan terminimalisirnya angka kasus kekerasan seksual di Indonesia. Pemerintah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan diikuti oleh lembaga- lembaga yang berkaitan ada baiknya jika lebih meningkatkan pemahaman masyarakat yang masih melek hukum untuk menyadarakan kasus kekerasan seksual ini, juga terhadap kategori-kategori orang yang rentan mengalami kekerasan seksual agar diberi edukasi untuk lebih siap siaga dan lebih berhati-hati agar terhindar dari kasus-kasus kekerasan seksual fisik maupun non-fisik.

SIMPULAN

1. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu pelaku dipidana karena telah melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pelaku akan dikenakan pidana apabila didapati melakukan tindakan-tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
2. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik menurut UndangUndang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu korban akan diberikan jaminan hak-hak penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Adapun lembaga-lembaga khusus yang menjadi pendamping bagi korban kekerasan seksual berbasis elektronik antara lain petugas LPSK, UPTD PPA, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, psikiater, dan pendamping lainnya. Korban kekerasan seksual berbasis elektronik tentu saja mengalami dan merasakan dampak kerugian akibat tindakan pelaku. Maka dari itu korban berhak mendapatkan bentuk ganti kerugian yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 berupa restitusi yang di terima oleh korban.

Saran

1. Bagi pemerintah sebagai aparatur negara, untuk lebih memperhatikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, khususnya dalam penegakan hukum terhadap pelaku KSBE agar lebih diperkuat proses penegakannya bagi pelaku, sehingga mendapat efek jerah dan tujuan diperkuatnya penegakan hukum ini agar dapat mencegah dan meminimalisir keberulangan tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik. Juga bagi lembaga-lembaga sosial terkait, agar dapat lebih meningkatkan perhatian terhadap masyarakat lebih khusus kelompok rentan yaitu perempuan dan anak-anak remaja, lewat pemberian sosialisasi-sosialisasi yang berkaitan dengan Tindak Kekerasan Seksual khususnya kekerasan seksual berbasis elektronik ini guna mencegah dan melindungi masyarakat dari kekerasan seksual berbasis elektronik.
2. Bagi seluruh masyarakat khususnya kelompok rentan yaitu kaum perempuan dan anak dibawah umur, untuk lebih bijak dan paham hukum dalam memandang kasus kekerasan seksual khususnya kekerasan seksual berbasis elektronik, apabila didapati terjadi terhadap diri sendiri maupun orang sekitar, jangan takut dan ragu

untuk melaporkan pada lembaga terkait maupun pihak berwajib dengan disertai bukti-bukti yang ada. Selalu tingkatkan diri, pandai-pandailah menilai suatu peristiwa khususnya yang terjadi di media sosial, jika merasa telah dilecehkan segeralah melakukan langkah awal pencegahan, dan upayakan untuk banyak belajar memahami edukasi-edukasi pencegahan kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Ely Dian Uswatina, dkk, "Power Perempuan Dalam Mencegah Kekerasan Seksual" (Pekalongan : PT Nasya Expanding Management), 2021, hlm.3.

Haris Sudirman Lubis, "Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi korban Penyalahgunaan Norkoba di Kota Batam", Skripsi, Universitas Internasional Batam, Batam, 2018, hlm, 68.

kamus hukum "penegakan hukum'.

Lawmetha. "metode penelitian hukum normatif", Wordpress, 19 Mei 2011, hlm, 3. https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/

Meleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rodakarya, Bandung, 2010, hlm, 186.

Munir, Nurdiman, Pengantar Hukum Siber Indonesia, Edisi Ketiga, PT. Grafindo Persada, Depok, 2017, him, 26.

Rohan Colier," Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas", (Yogyakarta: PT. Tiara Yogya),1998, hlm.4.

Soemitro, Ronny Hanitijo, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, Hlm, 97.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabet, Bandung, 2016, hlm, 240.